

Peran Kelompok Siaga Bencana Dalam Membangun Kesiapsiagaan Masyarakat Melalui Pendekatan (*Community-Based Preparedness*) di Kelurahan Simpang Haru Kota Padang

^{1*} Andini Berlianti Putri, ² Intan Slipilia

^{1, 2} Universitas Negeri Padang

*Corresponding Author e-mail: andiniberliantiputriiii@gmail.com

Received: July 2026; Revised: August 2026; Published: August 2026

Abstrak

Indonesia berada pada kawasan *Pacific Ring of Fire* dan pertemuan tiga lempeng tektonik utama sehingga memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana gempa bumi dan tsunami. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Kelompok Siaga Bencana (KSB) dibentuk sebagai organisasi relawan berbasis masyarakat untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling, memilih informan kunci, informan pendukung dan informan masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran KSB Kelurahan Simpang Haru dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat menghadapi gempa bumi dan tsunami melalui tiga dimensi *Community-Based Preparedness* (CBP) yaitu perencanaan, pelatihan, dan pengorganisasian masyarakat, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang memengaruhi pelaksanaannya, dengan menggunakan teori peran untuk menjelaskan dinamika role identity, role conflict, role ambiguity, dan role transition di balik kesenjangan implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSB telah berkontribusi dalam membangun kesiapsiagaan melalui pelatihan dan penguatan kelembagaan; namun, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan masih terbatas, pelatihan belum menjangkau masyarakat secara merata, dan aktivitas organisasi masih lebih berorientasi pada relawan daripada masyarakat. Selain itu, ketidakjelasan regulasi, keterbatasan sumber daya dan anggaran, serta rendahnya keberlanjutan partisipasi masyarakat masih menjadi kendala dalam penerapan *Community-Based Preparedness*. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan organisasi siaga bencana di tingkat komunitas belum secara otomatis mampu mewujudkan *Community-Based Preparedness* apabila tidak disertai dengan partisipasi masyarakat yang bermakna dalam proses perencanaan, pelatihan, dan pengorganisasian. Temuan ini memberikan implikasi praktis bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang.

Kata kunci: Kelompok Siaga Bencana; Community-Based Preparedness; Kesiapsiagaan Masyarakat; Gempa Bumi Dan Tsunami; Teori Peran.

How to Cite: Putri, A. B., & Slipilia, I. (2026). Peran Kelompok Siaga Bencana Dalam Membangun Kesiapsiagaan Masyarakat Melalui Pendekatan (*Community-Based Preparedness*) di Kelurahan Simpang Haru Kota Padang. *Journal of Authentic Research*, 5(3), 6291–6305. <https://doi.org/10.36312/jar.v5i3.6481>



<https://doi.org/10.36312/jar.v5i3.6481>

Copyright©2026, Putri et al.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](#) License.



PENDAHULUAN

Indonesia terletak pada kawasan *Pacific Ring of Fire* dan merupakan wilayah pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik, sehingga memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana gempa bumi dan tsunami (BNPB, 2022; BMKG, 2025). Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi dengan indeks risiko bencana tertinggi di Indonesia, sementara Kota Padang termasuk wilayah dengan risiko gempa bumi

dan tsunami tertinggi di Indonesia akibat posisinya di zona subduksi Mentawai, dengan waktu tempuh gelombang tsunami ke pesisir kota diperkirakan hanya 20–30 menit apabila gempa bersumber dari zona *megathrust* (BMKG, 2025; Rahmadhani et al., 2023). Berdasarkan Peta Rencana Evakuasi Kota Padang (inarisk.bnbp.go.id, 2013), Kelurahan Simpang Haru termasuk wilayah rawan tsunami karena berbatasan langsung dengan Kanal Banjir Banda Bakali yang berpotensi menjadi jalur rambatan gelombang tsunami sekaligus menghambat akses evakuasi (Rahmadhani et al., 2023). Kelurahan Simpang Haru memiliki luas wilayah 1,98 km² dengan jumlah penduduk mencapai 12.834 jiwa dan kepadatan penduduk 6.482 jiwa/km² (BPS Kota Padang, 2024), sehingga tingkat kerentanan terhadap bencana semakin tinggi karena populasi padat yang harus dievakuasi dalam waktu terbatas.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi landasan hukum utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, yang menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pengurangan risiko bencana (UU No. 24 Tahun 2007). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana yang melibatkan masyarakat secara partisipatif (PP No. 21 Tahun 2008). Sebagai respons atas kerentanan ini, Kota Padang membentuk Kelompok Siaga Bencana (KSB) di tingkat kelurahan berdasarkan Instruksi Wali Kota Padang Nomor 800.83/BPBD-Pdg/II/2017 tentang Pembentukan Kelompok Siaga Bencana, sebagai wujud implementasi pendekatan *Community-Based Preparedness* (CBP) yang menempatkan komunitas sebagai aktor utama kesiapsiagaan bencana (Shaw, 2012, 2014). KSB Kelurahan Simpang Haru sendiri telah memiliki struktur organisasi formal berdasarkan SK FKSB 2025–2030 dan telah menjalankan sejumlah kegiatan, seperti edukasi mitigasi kepada siswa SD dan simulasi *tsunami drill* bersama masyarakat (Padang.go.id, 2025).

Konsep *Community-Based Preparedness* (CBP) yang dikembangkan oleh Shaw (2012, 2014) menekankan bahwa kesiapsiagaan bencana harus dibangun melalui tiga dimensi utama: (1) perencanaan (*planning*) yang melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi risiko, menyusun rencana kontingensi, dan menetapkan mekanisme evakuasi sesuai kondisi lokal; (2) pelatihan (*training*) yang berfungsi sebagai proses pembelajaran sosial (*social learning*) yang memungkinkan masyarakat memahami risiko, berpartisipasi dalam pengurangan risiko, dan membangun kapasitas kolektif secara berkelanjutan; dan (3) pengorganisasian (*community organization*) yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam kesiapsiagaan melalui jejaring sosial yang mampu menggerakkan masyarakat secara kolektif dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang telah ada. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *Community-Based Disaster Risk Reduction* (CBDRR) yang dikemukakan oleh Wisner et al. (2004) dan Gaillard (2010), yang menekankan bahwa pengurangan risiko bencana harus berakar pada pengetahuan lokal, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan komunitas dalam menghadapi ancaman bencana.

Untuk memahami dinamika implementasi peran KSB di lapangan, penelitian ini menggunakan teori peran (*role theory*) yang dikembangkan oleh Anglin et al. (2022) sebagai pisau analisis. Anglin et al. (2022) mengidentifikasi empat konsep kunci dalam teori peran: (1) *role identity*, yaitu sejauh mana individu menginternalisasi peran tertentu sebagai bagian dari identitas dirinya; (2) *role conflict*, yaitu ketegangan yang timbul ketika tuntutan dari satu peran bertentangan dengan tuntutan dari peran

lain; (3) *role ambiguity*, yaitu ketidakjelasan mengenai harapan, tanggung jawab, dan kewenangan yang melekat pada suatu peran; dan (4) *role transition*, yaitu proses perubahan dari satu peran ke peran lain yang memerlukan penyesuaian perilaku dan identitas. Teori peran ini diperkuat oleh pandangan Biddle (1986) dan Katz & Kahn (1978) yang menekankan bahwa peran sosial terbentuk melalui interaksi antara harapan normatif, persepsi individu, dan perilaku aktual di lapangan (Adinda et al., 2025).

Meskipun demikian, observasi awal menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara mandat normatif KSB dan realitas pelaksanaannya: hanya ketua KSB yang memiliki alat komunikasi darurat, belum tersedia sekretariat maupun peta kebencanaan terbaru, dan Ketua KSB sendiri mengakui bahwa "masyarakat umumnya hanya belajar dari pengalaman gempa 2009" tanpa pembaruan pengetahuan yang berkelanjutan. Kajian terdahulu mengenai KSB di Kota Padang, seperti Harona dan Alhadi (2020) yang meneliti pembinaan BPBD terhadap KSB, serta Syahyanti dan Frinaldi (2020) yang meneliti KSB Kelurahan Olo, umumnya masih berhenti pada level deskripsi efektivitas kelembagaan. Kajian-kajian tersebut belum secara sistematis membedah sejauh mana ketiga dimensi CBP (perencanaan, pelatihan, pengorganisasian) benar-benar melibatkan masyarakat sebagai subjek, dan belum menggunakan teori peran sebagai pisau analisis untuk menjelaskan dinamika di balik kesenjangan implementasi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kesenjangan (*research gap*) dengan menggabungkan pendekatan CBP dan teori peran untuk menganalisis implementasi KSB secara lebih komprehensif, sebuah pendekatan yang belum digunakan pada kajian KSB terdahulu di Kota Padang.

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran KSB Kelurahan Simpang Haru dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat menghadapi gempa bumi dan tsunami melalui tiga dimensi CBP Shaw (2012, 2014), diperkuat teori peran Anglin et al. (2022) untuk menjelaskan dinamika *role identity*, *role conflict*, *role ambiguity*, dan *role transition* di balik kesenjangan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial secara mendalam, khususnya peran KSB dan implementasi Community-Based Preparedness, sebagaimana dianjurkan oleh Fadli (2021) bahwa pendekatan ini digunakan untuk menggali dan memahami fenomena sosial atau perilaku manusia secara mendalam sehingga menghasilkan uraian deskriptif yang kaya dalam bentuk naratif tanpa manipulasi lingkungan. Dalam penelitian ini *Community-Based Preparedness* digunakan sebagai kerangka konseptual utama, sedangkan teori peran digunakan sebagai pisau analisis untuk menjelaskan bagaimana KSB menjalankan fungsinya.

Penelitian dilaksanakan di Kota Padang, dengan lokus utama KSB Kelurahan Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur (kode pos 25171). Kelurahan Simpang Haru dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik sebagai kawasan perkotaan padat penduduk dengan luas 1,98 km², jumlah penduduk 12.834 jiwa, dan kepadatan 6.482 jiwa/km² (BPS Kota Padang, 2024), serta teridentifikasi sebagai wilayah rawan gempa bumi dan tsunami berdasarkan Peta Rencana Evakuasi Kota

Padang (inarisk.bnpb.go.id, 2013). Selain itu, KSB Kelurahan Simpang Haru termasuk salah satu KSB yang aktif di Kota Padang dengan struktur organisasi formal dan telah menjalankan berbagai program kesiapsiagaan. Lokasi dipilih secara *purposive sampling* karena wilayah tersebut teridentifikasi rawan gempa bumi dan tsunami serta merepresentasikan karakteristik wilayah perkotaan padat penduduk dengan KSB yang aktif. Penelitian juga melibatkan BPBD Kota Padang, KSB Kecamatan Padang Timur, dan Dinas Sosial Kota Padang sebagai instansi pendukung untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai kebijakan dan koordinasi kelembagaan.

Informan penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling* (Sugiyono, 2016), terdiri atas tiga kategori: (1) informan kunci, yaitu Ketua KSB Kelurahan Simpang Haru, Ketua KSB Kecamatan Padang Timur, serta pengurus/anggota bidang KSB; (2) informan pendukung, meliputi Lurah Simpang Haru, Ketua RT/RW, perwakilan BPBD Kota Padang, dan PMI Kota Padang; serta (3) informan masyarakat, yaitu warga yang pernah mengikuti sosialisasi/simulasi KSB maupun warga yang tinggal di wilayah rawan bencana. Kriteria pemilihan informan kunci adalah individu yang memiliki pengetahuan mendalam dan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan program KSB. Kriteria pemilihan informan pendukung adalah pihak-pihak yang memiliki keterkaitan kelembagaan dengan KSB dan dapat memberikan informasi tentang kebijakan, koordinasi, dan dukungan terhadap KSB. Kriteria pemilihan informan masyarakat adalah warga yang tinggal di Kelurahan Simpang Haru minimal 5 tahun, berusia dewasa (≥ 18 tahun), dan memiliki pengalaman tinggal di kawasan rawan bencana. Jumlah informan tidak ditentukan secara kaku, melainkan disesuaikan hingga tercapai titik kejenuhan data (*data saturation*), yang dalam penelitian ini diperoleh setelah mewawancarai 15 informan dari berbagai kategori.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi partisipatif, dan panduan dokumentasi. Pedoman wawancara dikembangkan berdasarkan indikator dari tiga dimensi Community-Based Preparedness (perencanaan, pelatihan, pengorganisasian) menurut Shaw (2012, 2014) serta konsep teori peran (role identity, role conflict, role ambiguity, role transition) menurut Anglin et al. (2022). Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap kegiatan KSB, kondisi sarana-prasarana, serta jalur evakuasi di lapangan, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan kelembagaan, dan literatur terkait (Sugiyono, 2016). Prosedur pengumpulan data dilakukan secara kronologis melalui tiga tahap: (1) tahap observasi awal dan studi dokumentasi selama 2 minggu untuk mengidentifikasi kondisi eksisting KSB dan kebijakan terkait; (2) tahap wawancara mendalam dengan informan kunci, pendukung, dan masyarakat yang berlangsung selama 4 minggu dengan durasi wawancara 60–90 menit per informan; dan (3) tahap observasi partisipatif terhadap kegiatan KSB yang berlangsung selama 3 minggu dengan frekuensi pengamatan 2–3 kali per minggu. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2016). Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi empat tahap: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data dengan mengelompokkan temuan berdasarkan tiga dimensi CBP menurut Shaw (2012, 2014)—perencanaan, pelatihan, dan pengorganisasian masyarakat—serta konsep teori peran Anglin et al. (2022); (3) penyajian data dalam bentuk narasi, matriks, dan

kutipan informan; dan (4) penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dikelompokkan berdasarkan tiga dimensi CBP kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan teori peran Anglin et al. (2022) untuk mengidentifikasi pola *role identity*, *role conflict*, *role ambiguity*, dan *role transition*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran KSB dalam Dimensi Perencanaan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran KSB dalam dimensi perencanaan belum terlaksana secara optimal pada tingkat kelurahan. Perencanaan kesiapsiagaan masih didominasi oleh BPBD Kota Padang bersama Forum KSB Kota melalui penyusunan peta risiko dan jalur evakuasi, sedangkan KSB Kelurahan Simpang Haru belum dilibatkan secara langsung dalam proses tersebut. Hal ini terungkap dari pernyataan Ketua KSB Kelurahan Simpang Haru (IK1): "Kami tidak dilibatkan dalam pembuatan peta risiko. Peta yang ada masih dari tahun 2009, dan sampai sekarang belum ada pembaruan yang disosialisasikan ke masyarakat." Pernyataan ini diperkuat oleh Perwakilan BPBD Kota Padang (IP2) yang menyatakan: "Perencanaan memang masih dilakukan di tingkat kota melalui Forum KSB Kota. Untuk kelurahan, kami belum memiliki mekanisme pelibatan yang sistematis."

Penelitian juga menunjukkan bahwa peta kebencanaan terbaru belum dipublikasikan kepada masyarakat sehingga informasi mengenai jalur evakuasi dan titik kumpul belum tersampaikan secara luas. Berdasarkan observasi di lapangan, tidak ditemukan peta evakuasi yang terpasang di tempat-tempat strategis seperti balai kelurahan, pos RT/RW, atau sekolah-sekolah di Kelurahan Simpang Haru. Sebagian besar masyarakat belum mengetahui lokasi evakuasi resmi dan masih mengandalkan pengetahuan pribadi maupun pengalaman saat gempa tahun 2009 dalam menentukan tindakan penyelamatan. Hal ini tercermin dari pernyataan informan masyarakat IM3: "Saya tidak tahu titik kumpul evakuasi resmi. Kalau gempa, saya hanya lari ke tempat yang lebih tinggi seperti yang saya lakukan dulu tahun 2009." Selain itu, ditemukan adanya perbedaan persepsi mengenai tingkat kerawanan wilayah Simpang Haru di antara para pemangku kepentingan, yang menunjukkan belum seragamnya pemahaman terhadap hasil pemetaan risiko. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa proses perencanaan kesiapsiagaan masih lebih berorientasi pada pemerintah (*government-based*) daripada masyarakat (*community-based*).

Selain aspek perencanaan teknis, penelitian ini juga menemukan kerancuan regulasi yang turut menghambat kejelasan mandat perencanaan, yaitu tumpang tindih konsep antara "Kampung Siaga Bencana" (Permensos Nomor 128 Tahun 2011, Kementerian Sosial) dan "Kelompok Siaga Bencana" (BPBD/BNPB). Lurah Simpang Haru (IP1) mengungkapkan: "Kami sering bingung dengan regulasi yang tumpang tindih antara Kampung Siaga Bencana dari Kementerian Sosial dan KSB dari BPBD. Ini menyebabkan peran dan tanggung jawab di tingkat kelurahan menjadi tidak jelas." Perbedaan pemahaman mengenai kedua kelembagaan tersebut di tingkat BPBD, pemerintah kelurahan, dan pengurus KSB menyebabkan pembagian peran dalam perencanaan kesiapsiagaan belum berjalan secara jelas dan konsisten.

Pembahasan: Temuan penelitian menunjukkan bahwa dimensi perencanaan kesiapsiagaan gempa bumi dan tsunami di Kota Padang telah dilaksanakan melalui penyusunan peta kebencanaan dan jalur evakuasi oleh Forum KSB Kota Padang

bersama BPBD, namun pada tingkat KSB Kelurahan Simpang Haru tidak dilibatkan dalam penyusunan peta risiko maupun forum perencanaan, peta kebencanaan yang digunakan masih mengacu pada tahun 2009 sementara peta terbaru belum dipublikasikan, dan belum tersedianya shelter evakuasi maupun titik kumpul yang terstandardisasi turut menunjukkan bahwa perencanaan belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan masyarakat di tingkat lokal, sehingga masyarakat dan KSB kelurahan belum memiliki ruang partisipasi yang memadai dan proses perencanaan masih didominasi oleh pendekatan *top-down*. Kondisi ini menunjukkan bahwa dimensi perencanaan dalam *Community-Based Preparedness* (CBP) menurut Shaw (2012, 2014) telah dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip utama CBP yang menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam mengidentifikasi risiko, menyusun rencana kontingensi, dan menetapkan mekanisme evakuasi sesuai kondisi lokal, karena perencanaan yang masih berorientasi pada pemerintah menyebabkan masyarakat belum terlibat secara aktif dalam menentukan langkah-langkah kesiapsiagaan di lingkungannya. Dengan demikian, implementasi yang berlangsung di Simpang Haru masih lebih mencerminkan *government-based planning* daripada *community-based planning*, sehingga tujuan CBP untuk membangun kapasitas masyarakat melalui proses perencanaan partisipatif belum tercapai secara optimal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Laveda et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pendekatan Community-Based Disaster Management di Kelurahan Jatibening masih menghadapi tantangan dalam hal partisipasi masyarakat dalam perencanaan, serta penelitian Harona dan Alhadi (2020) yang menemukan bahwa pembinaan BPBD terhadap KSB di Kota Padang masih lebih bersifat instruktif daripada partisipatif.

Kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui teori peran Anglin et al. (2022). Minimnya pelibatan KSB kelurahan dalam proses perencanaan menunjukkan adanya *role ambiguity*, yaitu belum jelasnya peran dan kewenangan KSB dalam penyusunan rencana kesiapsiagaan. Secara normatif KSB diposisikan sebagai lembaga kesiapsiagaan masyarakat, tetapi dalam praktiknya kewenangan perencanaan masih terpusat pada pemerintah daerah. Akibatnya KSB lebih banyak berfungsi sebagai pelaksana program dibandingkan sebagai penggerak *Community-Based Preparedness*. Selain itu, tumpang tindih regulasi antara Kampung Siaga Bencana (Kemensos) dan KSB (BPBD) memperkuat *role ambiguity* karena KSB dan perangkat kelurahan tidak memiliki panduan yang jelas mengenai pembagian peran dan tanggung jawab dalam perencanaan kesiapsiagaan. Kondisi ini sejalan dengan temuan Biddle (1986) yang menyatakan bahwa *role ambiguity* muncul ketika ekspektasi peran tidak didefinisikan secara jelas dan konsisten, sehingga mengakibatkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas.

Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya kesiapsiagaan masyarakat. Rendahnya keterlibatan warga dalam proses perencanaan menyebabkan masyarakat belum memiliki pemahaman yang sama mengenai peta risiko, jalur evakuasi, maupun titik kumpul yang telah disepakati. Akibatnya, keputusan evakuasi saat terjadi bencana berpotensi dilakukan secara spontan berdasarkan pengetahuan masing-masing, bukan berdasarkan rencana yang disusun bersama. Penelitian Hamdika et al. (2025) juga menemukan bahwa kurangnya sosialisasi peta risiko dan jalur evakuasi menyebabkan masyarakat tidak memiliki kesiapan yang memadai dalam menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kesiapsiagaan berbasis

komunitas tidak hanya memerlukan dokumen perencanaan dan regulasi, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh proses perencanaan agar terbentuk kesepahaman, rasa memiliki, dan kesiapan kolektif dalam menghadapi bencana.

Peran KSB dalam Dimensi Pelatihan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas anggota dilakukan melalui pelatihan manajemen posko, penggunaan handy talky, pertolongan pertama, penggunaan peralatan penyelamatan, serta simulasi kebencanaan yang diselenggarakan oleh BPBD Kota Padang, termasuk Jambore KSB se-Kota Padang dan simulasi *tsunami drill* berskala 152.000 peserta. Program tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi teknis anggota KSB dalam mendukung kegiatan penanggulangan bencana. Hal ini diungkapkan oleh salah satu anggota KSB (IK3): "Saya pernah mengikuti pelatihan pertolongan pertama dan penggunaan handy talky dari BPBD. Pelatihan ini sangat membantu saya memahami cara merespons saat terjadi bencana."

Namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas tersebut belum sepenuhnya menjangkau masyarakat. Dari dua puluh anggota terdaftar KSB Simpang Haru, hanya tujuh hingga delapan orang yang benar-benar menerima pelatihan berkelanjutan, dan pelatihan tersebut masih terbagi per bidang keahlian sehingga kompetensi antaranggota belum merata. Ketua KSB Kelurahan Simpang Haru (IK1) menjelaskan: "Pelatihan hanya diberikan kepada beberapa anggota sesuai bidangnya. Ada yang dilatih untuk posko, ada yang untuk pertolongan pertama, tidak semua anggota mendapatkan pelatihan yang sama." Edukasi kebencanaan kepada masyarakat luas juga masih terbatas pada kegiatan tertentu dan belum dilaksanakan secara berkelanjutan di tingkat kelurahan; tiga dari lima informan warga bahkan mengaku tidak pernah menerima sosialisasi kebencanaan sejak gempa tahun 2009. Hal ini terungkap dari pernyataan informan IM5: "Saya tidak pernah mendapat sosialisasi kebencanaan setelah gempa 2009. Yang saya tahu hanya dari pengalaman waktu gempa dulu." Ketua KSB menilai beberapa simulasi belum tepat sasaran terhadap peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. IK1 menyatakan: "Simulasi yang ada kadang hanya seremonial dan tidak melibatkan masyarakat secara luas. Akibatnya, dampaknya terhadap kesiapsiagaan masyarakat belum terasa."

Penelitian juga menemukan bahwa keterbatasan pelatihan diikuti oleh belum optimalnya komunikasi risiko kepada masyarakat. Jangkauan kegiatan tersebut belum merata sehingga sebagian besar masyarakat masih belum mengenal keberadaan KSB maupun memahami prosedur evakuasi yang benar. Berbagai sarana komunikasi risiko yang pernah tersedia, seperti rambu batas aman tsunami (*blue zone*), banyak yang telah rusak atau hilang dan belum diperbarui. Berdasarkan observasi lapangan, dari 5 titik rambu *blue zone* yang seharusnya terpasang di Kelurahan Simpang Haru, hanya 2 yang masih terlihat dan kondisinya sudah rusak/tidak terbaca. Penelitian juga menemukan adanya ketimpangan kemampuan komunikasi di antara anggota KSB dalam menyampaikan edukasi kebencanaan kepada masyarakat, sehingga memengaruhi efektivitas penyebaran informasi risiko di tingkat komunitas. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa dimensi pelatihan dalam Community-Based Preparedness masih lebih berorientasi pada peningkatan kapasitas organisasi daripada pembelajaran masyarakat secara berkelanjutan.

Pembahasan: Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dalam *Community-Based Preparedness* (CBP) telah meningkatkan kapasitas teknis sebagian anggota KSB melalui berbagai pelatihan dan simulasi kebencanaan yang didukung pemerintah. Namun, pelaksanaannya belum menjangkau seluruh anggota karena partisipasi pelatihan masih terbatas pada anggota tertentu sesuai bidang keahlian. Selain itu, manfaat pelatihan juga belum dirasakan secara luas oleh masyarakat, yang tercermin dari minimnya sosialisasi berkelanjutan serta penilaian bahwa sebagian simulasi belum memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesiapsiagaan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa dimensi pelatihan dalam *Community-Based Preparedness* menurut Shaw (2014) telah berjalan, tetapi belum memenuhi prinsip utama CBP, yaitu meningkatkan kapasitas masyarakat secara menyeluruh melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan. Pelatihan yang masih berfokus pada relawan menyebabkan peningkatan kapasitas lebih banyak terjadi pada tingkat organisasi dibandingkan pada tingkat komunitas. Akibatnya, pengetahuan masyarakat mengenai kebencanaan masih bertumpu pada pengalaman Gempa 2009 dan belum berkembang melalui pelatihan maupun sosialisasi yang berkesinambungan. Kondisi ini juga berkaitan dengan lemahnya komunikasi risiko, yang ditunjukkan oleh rendahnya pengenalan masyarakat terhadap KSB, ketidakkonsistenan pemahaman mengenai zona risiko, kerusakan penanda risiko (*blue zone*), serta perbedaan kemampuan anggota KSB dalam menyampaikan edukasi kebencanaan. Dalam perspektif Shaw (2012, 2014), pelatihan dalam *Community-Based Preparedness* tidak dimaksudkan sebagai peningkatan kapasitas relawan semata, melainkan sebagai proses pembelajaran sosial (*social learning*) yang memungkinkan masyarakat memahami risiko, berpartisipasi dalam pengurangan risiko, dan membangun kapasitas kolektif secara berkelanjutan. Penelitian Suparji et al. (2025) juga menekankan bahwa pengembangan modul kesiapsiagaan berbasis komunitas harus melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembelajaran, bukan hanya transfer pengetahuan satu arah.

Kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui teori peran Anglin et al. (2022). Pelatihan yang hanya menjangkau sebagian anggota KSB menunjukkan adanya *role ambiguity*, yaitu peran organisasi dalam meningkatkan kapasitas masyarakat belum dipahami dan dijalankan secara menyeluruh karena pelaksanaan pelatihan masih berfokus pada relawan. Selain itu, ketidakjelasan siapa yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelatihan rutin bagi masyarakat (apakah KSB, BPBD, atau pemerintah kelurahan) memperkuat *role ambiguity* karena tidak ada mekanisme yang jelas mengenai pembagian peran dalam edukasi kebencanaan. Kritik Ketua KSB terhadap efektivitas simulasi mencerminkan adanya *role conflict*, yaitu ketidaksesuaian antara tuntutan peran sebagai pelaksana program dengan hasil yang dirasakan di lapangan. Anglin et al. (2022) menjelaskan bahwa *role conflict* terjadi ketika individu atau organisasi menghadapi tuntutan peran yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ekspektasi, yang dalam konteks ini terlihat dari kesenjangan antara program yang dijalankan dan dampak yang diharapkan terhadap masyarakat. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya kesiapsiagaan masyarakat karena kapasitas yang terbentuk masih terkonsentrasi pada sebagian relawan, sementara masyarakat secara umum belum memiliki pengetahuan, pemahaman risiko, dan kemampuan kesiapsiagaan yang merata. Temuan ini

konsisten dengan hasil penelitian Hamdika et al. (2025) dan Setioputro et al. (2025) mengenai optimalisasi kesiapsiagaan bencana gempa bumi dan tsunami, yang menekankan bahwa penguatan kesadaran risiko tidak akan efektif tanpa strategi komunikasi risiko yang konsisten dan berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan sosialisasi insidental. Temuan ini memperlihatkan bahwa efektivitas dimensi pelatihan dalam *Community-Based Preparedness* tidak hanya dipengaruhi oleh frekuensi pelatihan, tetapi juga oleh kejelasan peran organisasi, pemerataan kapasitas anggota, dan kemampuan organisasi mentransformasikan pengetahuan kebencanaan menjadi pembelajaran kolektif masyarakat.

Peran KSB dalam Dimensi Pengorganisasian

Temuan penelitian bahwa KSB telah membangun pengorganisasian melalui koordinasi dengan pemerintah kelurahan, BPBD, Forum KSB Kecamatan, Babinsa, Babinkamtibmas, Dubalang, LPM, serta organisasi masyarakat lainnya, dan memanfaatkan komunikasi melalui grup WhatsApp serta kegiatan gotong royong lintas kelurahan sebagai media koordinasi. Hal ini diungkapkan oleh Ketua KSB Kecamatan Padang Timur (IK2): "Kami memiliki jaringan yang kuat dengan berbagai pihak. Setiap ada kegiatan, kami koordinasi melalui grup WhatsApp dan rapat rutin." Meskipun jejaring kelembagaan telah terbentuk, aktivitas organisasi masih lebih banyak berorientasi pada penanganan ketika bencana terjadi dibandingkan kegiatan pencegahan yang dilakukan secara rutin, sebagaimana ditunjukkan oleh pernyataan IK1 bahwa "organisasi baru bergerak kalau ada kasus (*by case*)". Kondisi ini menunjukkan bahwa KSB lebih banyak mengorganisasi relawan dibandingkan mengorganisasi masyarakat, sehingga fungsi preventif organisasi belum berjalan secara optimal.

Dari sisi kapasitas kelembagaan, rasio anggota aktif KSB Simpang Haru tergolong rendah (7–8 dari 20 anggota terdaftar), dengan komposisi didominasi perempuan yang membatasi pelaksanaan tugas bertenaga fisik tinggi seperti evakuasi darurat. IK1 menjelaskan: "Kebanyakan anggota kami adalah ibu-ibu rumah tangga. Untuk evakuasi yang membutuhkan tenaga fisik, kami agak kesulitan karena harus meminta bantuan dari pihak lain." Distribusi pelatihan antaranggota juga belum merata, dan kondisi ekonomi anggota turut memengaruhi konsistensi keterlibatan dalam kegiatan organisasi karena sebagian besar anggota harus memprioritaskan pekerjaan utama dibandingkan aktivitas kerelawanan. Salah satu anggota KSB (IK3) mengungkapkan: "Saya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, jadi tidak selalu bisa hadir dalam setiap kegiatan KSB."

Dari sisi sarana, prasarana, dan anggaran, KSB belum memiliki sekretariat tetap, ketersediaan peralatan operasional masih terbatas, dan dukungan anggaran belum mampu memenuhi kebutuhan kegiatan edukasi maupun operasional organisasi. Berdasarkan observasi, KSB Kelurahan Simpang Haru tidak memiliki kantor sekretariat dan menyimpan dokumen serta perlengkapan di rumah Ketua KSB. Peralatan yang tersedia hanya beberapa unit handy talky dan satu set perlengkapan P3K. Pendanaan kegiatan lebih banyak bergantung pada pokok pikiran anggota dewan yang bersifat tidak tetap, sementara KSB dilarang mencari dana secara mandiri dan belum memiliki skema insentif bagi relawan. IK1 menyatakan: "Kami tidak boleh menggalang dana sendiri. Anggaran kami tergantung dari pokir dewan yang tidak pasti setiap tahunnya." Bahkan keterbatasan biaya operasional sederhana, seperti konsumsi saat pertemuan, menjadi hambatan dalam mengumpulkan

perwakilan masyarakat untuk kegiatan edukasi dan koordinasi, sehingga keberlanjutan program kesiapsiagaan sangat bergantung pada bantuan pemerintah, dukungan pihak lain, serta inisiatif pribadi anggota KSB.

Di tengah keterbatasan kelembagaan tersebut, masyarakat Simpang Haru juga memiliki modal sosial yang berpotensi memperkuat pengorganisasian kesiapsiagaan, antara lain melalui kegiatan keagamaan seperti surau dan pesantren Ramadan yang selama ini berfungsi sebagai penguatan kesiapsiagaan berbasis nilai religius secara informal. Hal ini diungkapkan oleh Ketua RW (IP5): "Kami sudah memiliki tradisi gotong royong dan kegiatan keagamaan di surau. Potensi ini bisa dimanfaatkan untuk sosialisasi kebencanaan." Namun demikian, modal sosial ini belum diintegrasikan secara sengaja ke dalam struktur pengorganisasian formal KSB, sehingga potensinya sebagai basis mobilisasi masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal.

Ketimpangan pengorganisasian tersebut pada akhirnya tercermin pada rendahnya partisipasi masyarakat. Dari enam informan masyarakat, hanya satu orang yang mengenal KSB dan pernah merasakan manfaat kegiatannya, sedangkan lima lainnya tidak mengenal maupun merasakan peran organisasi tersebut, dan tidak ada informan yang mengetahui titik kumpul evakuasi resmi. IM1 (satu-satunya yang mengenal KSB) menyatakan: "Saya tahu KSB karena pernah ikut sosialisasi di kelurahan, tapi setelah itu tidak ada tindak lanjut." Sementara IM4 menyatakan: "Saya tidak tahu KSB itu apa. Saya hanya tahu kalau terjadi gempa, saya lari ke tempat aman seperti dulu." Sebagian masyarakat juga lebih memprioritaskan kebutuhan ekonomi dibandingkan mengikuti kegiatan kesiapsiagaan. IM3 mengungkapkan: "Saya lebih fokus mencari nafkah untuk keluarga. Kegiatan kebencanaan tidak memberikan penghasilan langsung." Kondisi ini menunjukkan bahwa jejaring antar lembaga yang telah terbentuk dengan baik belum diikuti oleh pengorganisasian warga di tingkat RT/RW, sehingga kesiapsiagaan kolektif berbasis partisipasi masyarakat di tingkat komunitas belum berkembang secara optimal.

Pembahasan: Temuan penelitian menunjukkan bahwa dimensi pengorganisasian telah terbentuk secara formal melalui struktur KSB berjenjang dan jejaring lintas sektor, namun aktivitasnya masih lebih berorientasi pada koordinasi antarlembaga dan bersifat reaktif dibandingkan pemberdayaan masyarakat secara langsung. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan, sarana-prasarana, dan pendanaan yang telah diuraikan pada bagian Hasil.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa dimensi pengorganisasian dalam *Community-Based Preparedness* (CBP) menurut Shaw (2012, 2014) telah berjalan melalui pembentukan struktur organisasi dan jejaring kelembagaan, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip utama CBP yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam kesiapsiagaan. Pengorganisasian yang lebih berorientasi pada koordinasi antarlembaga menyebabkan kapasitas yang berkembang masih berada pada tingkat organisasi, sedangkan pengorganisasian masyarakat di tingkat RT/RW belum terbentuk secara berkelanjutan. Keterbatasan kapasitas kelembagaan, sarana, prasarana, dan pendanaan juga menyebabkan kegiatan edukasi, koordinasi, serta mobilisasi masyarakat tidak dapat dilakukan secara rutin. Padahal, menurut Shaw (2012), keberhasilan CBP sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi membangun jejaring sosial yang mampu menggerakkan masyarakat secara kolektif dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang telah ada. Penelitian Ida et al. (2024) juga menemukan bahwa resiliensi komunitas sangat dipengaruhi oleh modal sosial dan

jaringan sosial yang ada di masyarakat, yang dapat menjadi fondasi bagi kesiapsiagaan bencana. Selain itu, Gunawan (2023) menunjukkan bahwa masyarakat pesisir memiliki modal sosial yang kuat melalui tradisi gotong royong yang dapat dioptimalkan untuk pengurangan risiko bencana. Namun, penelitian ini menemukan bahwa modal sosial yang ada di Simpang Haru belum diintegrasikan secara sistematis ke dalam struktur pengorganisasian KSB.

Kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui teori peran Anglin et al. (2022). KSB masih berada pada *role transition*, yaitu proses transisi dari organisasi yang lebih berorientasi pada respons darurat menuju organisasi yang menjalankan fungsi kesiapsiagaan berbasis komunitas. Anglin et al. (2022) menjelaskan bahwa *role transition* memerlukan penyesuaian perilaku, identitas, dan struktur organisasi, yang dalam konteks KSB belum sepenuhnya terjadi karena masih dominannya orientasi respons darurat dibandingkan kesiapsiagaan preventif. Di samping itu, keterbatasan jumlah anggota aktif dan tuntutan ekonomi relawan menunjukkan adanya *role conflict*, di mana tuntutan peran sebagai relawan KSB bertentangan dengan tuntutan peran sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga (Anglin et al., 2022), sedangkan belum jelasnya dukungan pendanaan dan pembagian tanggung jawab organisasi mencerminkan *role ambiguity* dalam pelaksanaan peran KSB. Selain itu, dominasi anggota perempuan dalam KSB menciptakan *role conflict* tersendiri karena tugas evakuasi yang membutuhkan tenaga fisik tinggi sering kali tidak sesuai dengan peran gender yang diharapkan, sehingga KSB harus meminta bantuan pihak lain saat menghadapi situasi darurat yang memerlukan kekuatan fisik.

Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya kesiapsiagaan masyarakat. Hal ini terlihat dari rendahnya partisipasi warga dalam kegiatan KSB, di mana hanya satu dari enam informan masyarakat yang mengenal KSB dan pernah merasakan manfaat kegiatannya, sedangkan sebagian besar tidak mengetahui keberadaan organisasi maupun titik kumpul evakuasi resmi. Akibatnya, kesiapsiagaan masih bertumpu pada kapasitas relawan dan jejaring kelembagaan, belum berkembang menjadi kapasitas kolektif masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan temuan Harona dan Alhadi (2020) serta Syahyanti dan Frinaldi (2020) pada kelurahan lain di Kota Padang, yang juga menunjukkan bahwa jejaring kelembagaan KSB yang terbentuk baik belum diikuti oleh pengorganisasian partisipatif di tingkat warga, menegaskan bahwa persoalan ini bersifat struktural, bukan kasus tunggal Simpang Haru. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan pengorganisasian dalam *Community-Based Preparedness* tidak cukup hanya melalui pembentukan struktur organisasi dan jejaring antarlembaga, tetapi juga perlu diarahkan pada pembentukan kelompok siaga di tingkat komunitas, pemanfaatan modal sosial lokal, serta peningkatan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan agar kesiapsiagaan menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga, bukan hanya organisasi relawan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *Community-Based Preparedness* di Kelurahan Simpang Haru masih didominasi oleh tiga orientasi utama. Pertama, pada dimensi perencanaan, implementasi CBP masih bersifat *government-based*, sehingga masyarakat belum dilibatkan secara aktif dalam menyusun rencana keselamatannya sendiri. Kedua, pada dimensi pelatihan, implementasi masih berorientasi pada penguatan kapasitas organisasi (*organization-based*), sehingga pelatihan dan komunikasi risiko belum mampu menjangkau masyarakat secara luas dan pengetahuan kebencanaan

masyarakat masih bertumpu pada pengalaman Gempa 2009 tanpa pembaruan yang sistematis. Ketiga, pada dimensi pengorganisasian, implementasi masih berfokus pada relawan (*volunteer-based*) dibandingkan mengorganisasi masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kesiapsiagaan belum berkembang secara rutin. Ketiga karakteristik tersebut saling berkaitan dan tercermin dari temuan bahwa hanya satu dari enam informan masyarakat yang mengenal KSB dan pernah merasakan manfaat kegiatannya, sedangkan lima informan lainnya tidak mengenal maupun merasakan peran organisasi tersebut, bahkan tidak ada satu pun yang mengetahui titik kumpul evakuasi resmi. Matriks berikut menyajikan ringkasan temuan pada setiap dimensi CBP beserta indikator teori peran yang relevan.

Tabel 2. Ringkasan Temuan pada Setiap Dimensi CBP

Dimensi CBP	Indikator	Temuan Utama	Indikator Teori Peran
Perencanaan	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan	KSB kelurahan tidak dilibatkan dalam penyusunan peta risiko; peta kebencanaan belum diperbarui/disosialisasikan; masyarakat tidak mengetahui titik kumpul evakuasi; regulasi tumpang tindih	Role ambiguity (ketidakjelasan peran)
	Pelatihan dan komunikasi risiko	Pelatihan hanya menjangkau 7-8 dari 20 anggota; masyarakat tidak mendapat sosialisasi berkelanjutan; rambu blue zone rusak; simulasi lebih seremonial	Role ambiguity, Role conflict
Pengorganisasian	Jejaring dan partisipasi masyarakat	Jejaring kelembagaan terbentuk namun aktivitas reaktif (by case); anggota aktif rendah (7-8 dari 20); tidak ada sekretariat; pendanaan tidak pasti; modal sosial belum terintegrasi	Role transition, Role conflict, Role ambiguity

Menurut Shaw (2012, 2014), efektivitas *Community-Based Preparedness* (CBP) tidak hanya ditentukan oleh keberadaan organisasi atau tersedianya berbagai program, tetapi oleh kemampuan perencanaan, pelatihan, dan pengorganisasian dalam mendorong masyarakat berperan sebagai aktor utama dalam upaya kesiapsiagaan. Oleh karena itu, temuan di Simpang Haru menunjukkan bahwa implementasi CBP masih lebih berorientasi pada penguatan kesiapsiagaan di tingkat kelembagaan daripada membangun kapasitas kolektif masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan konsep *role identity* Anglin et al. (2022), yang menjelaskan bahwa identitas KSB telah terbentuk di kalangan pengurus, tetapi belum memperoleh pengakuan dari masyarakat karena interaksi dan pelibatan warga masih terbatas. Akibatnya, muncul kesenjangan antara persepsi pengurus terhadap keberhasilan organisasi dan pengalaman masyarakat yang sebagian besar belum merasakan manfaat keberadaan KSB. Temuan ini menegaskan bahwa pembentukan kelembagaan saja belum cukup untuk mewujudkan kesiapsiagaan berbasis komunitas. CBP hanya akan tercapai apabila masyarakat berperan sebagai aktor utama yang terlibat secara berkelanjutan dalam perencanaan, pelatihan, dan pengorganisasian, sekaligus didukung oleh

faktor-faktor kelembagaan yang mampu memperkuat partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan Kelompok Siaga Bencana (KSB) di Kelurahan Simpang Haru belum secara otomatis menghasilkan *Community-Based Preparedness* (CBP) yang efektif. Meskipun KSB telah menjalankan berbagai program kesiapsiagaan, implementasi ketiga dimensi CBP menurut Shaw (2012, 2014)—perencanaan, pelatihan, dan pengorganisasian—masih lebih berorientasi pada penguatan kapasitas kelembagaan dan relawan daripada pemberdayaan masyarakat sebagai aktor utama. Perencanaan masih bersifat *government-based* dan dominan *top-down*, pelatihan belum menjangkau warga secara merata dan masih terbatas pada anggota tertentu, serta pengorganisasian lebih banyak menggerakkan relawan dan aparat dibandingkan membangun partisipasi kolektif warga di tingkat RT/RW. Kondisi ini tercermin dari minimnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan KSB, prosedur evakuasi, dan titik kumpul resmi, yang sebagian besar masih bertumpu pada pengalaman gempa tahun 2009.

Berdasarkan teori peran Anglin et al. (2022), ketidakoptimalan tersebut disebabkan oleh *role ambiguity* akibat tumpang tindih regulasi dan ketidakjelasan mandat kelembagaan, *role conflict* antara tuntutan kerelawanan dan pekerjaan utama anggota, serta *role transition* dari organisasi respons darurat menuju organisasi kesiapsiagaan berbasis komunitas yang belum tuntas. Hambatan struktural seperti keterbatasan sarana, prasarana, pendanaan, dan lemahnya komunikasi risiko semakin memperparah kondisi. Penelitian ini menegaskan bahwa pembentukan organisasi siaga bencana di tingkat komunitas tidak cukup untuk mewujudkan CBP tanpa disertai pelibatan masyarakat yang bermakna dalam seluruh proses kesiapsiagaan. Keberhasilan CBP hanya akan tercapai apabila masyarakat berperan sebagai subjek, bukan sekadar objek, yang didukung oleh kejelasan peran, keberlanjutan regulasi, dan pendanaan yang memadai.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan agar BPBD Kota Padang bersama Pemerintah Kelurahan Simpang Haru segera melakukan harmonisasi regulasi antara konsep Kampung Siaga Bencana (Kemensos) dan KSB (BNPB/BPBD) untuk menghilangkan *role ambiguity* dan memperjelas pembagian peran, kewenangan, serta tanggung jawab setiap pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan kesiapsiagaan. KSB perlu mengembangkan mekanisme perencanaan partisipatif yang melibatkan warga melalui musyawarah RT/RW, memperluas jangkauan pelatihan dan komunikasi risiko kepada seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan (bukan hanya relawan), serta memperbaiki sarana penanda risiko seperti rambu *blue zone* dan jalur evakuasi. Pemerintah daerah juga perlu mengalokasikan anggaran operasional yang memadai dan menyediakan insentif bagi relawan agar konsistensi keterlibatan masyarakat meningkat, serta mengintegrasikan modal sosial lokal (kegiatan keagamaan, gotong royong) ke dalam struktur pengorganisasian KSB guna memperkuat mobilisasi dan partisipasi warga secara kolektif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Adinda, B. P., Putri, N. E., & Padang, U. N. (2025). Upaya melakukan pengembangan kapasitas kelembagaan bagi Kelompok Siaga Bencana (KSB) dalam meningkatkan mitigasi bencana alam di Kota Padang Panjang. *Jurnal Ilmiah*, 4, 1764–1782.
- Anglin, A. H., Kincaid, P. A., Short, J. C., & Allen, D. G. (2022). Role theory perspectives: Past, present, and future applications of role theories in management research. *Journal of Management*, 48(6), 1469–1502. <https://doi.org/10.1177/01492063221081442>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2022). *Panduan pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas*. BNPB.
- BPBD Kota Padang. (2024). *BPBD Kota Padang gelar pelatihan untuk KSB Kecamatan Padang Timur di Hotel HW Padang*. <https://bpbd.padang.go.id>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Gunawan, H. (2023). Analisis peran masyarakat pesisir terhadap ketahanan pasca bencana alam di desa pesisir. *Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (JKPT)*, 1, 47–52.
- Harona, R. S., & Alhadi, Z. (2020). Efektifitas peran BPBD Kota Padang dalam melakukan pembinaan terhadap Kelompok Siaga Bencana (KSB). *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 2(2), 309–315.
- Ida, I., Wahyudin, D., Ede, A. R. La, Sanjaya, W., & Melinda, F. (2024). Pengaruh resiliensi komunitas terhadap kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana gempa bumi. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*, 15(2), 343–352. <https://doi.org/10.34305/jikbh.v15i02.1311>
- inarisk.bnpb.go.id Padang, Kota Timur. (2013). *Peta rencana evakuasi Kota Padang*. https://inarisk.bnpb.go.id/renevak_kotapadang
- Laveda, A. T., Ningsih, S., & Setyawati, K. (2024). Pendekatan *Community Based Disaster Management (CBDM)* melalui Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kelurahan Jatibening. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 7(1), 25–34. <https://doi.org/10.61332/ijpa.v7i1.138>
- Mitigasi bencana, Wako Padang tegaskan peran strategis KSB. (2025). *Langgam.id*. <https://langgam.id/mitigasi-bencana-wako-padang-tegaskan-peran-strategis-ksb/>
- Padang.go.id. (2025). *Lebih 200 ribu warga Kota Padang bakal ikuti drill gempa bumi berpotensi tsunami*. IKP Diskominfo Kota Padang. <https://padang.go.id/berita>
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana. (2011). *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 693*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. (2008).
- Rahmadhani, Z. S. F., Teuku, Y. W. N., & Cipta Endayana. (2023). Prediksi landaan bencana tsunami ketinggian 5 dan 12 meter di Kota Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Geologi dan Sumberdaya Mineral*, 24(3), 125–134. <https://doi.org/10.33332/jgsm.geologi.v24i3.747>

- Setioputro, B., Yunanto, R. A., Haristiani, R., & Rokhmah, D. (2025). Optimalisasi level kesiapsiagaan bencana gempa bumi dan tsunami kelompok rentan melalui disaster empowerment center. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 8(1), 200–214.
- Shaw, R. (2012). *Community based disaster risk reduction*. Emerald Group Publishing. [https://doi.org/10.1108/S2040-7262\(2012\)10](https://doi.org/10.1108/S2040-7262(2012)10)
- Shaw, R. (2014). *Community practices for disaster risk reduction in Japan*. *Disaster Risk Reduction*, 1, 3–20. <https://doi.org/10.1007/978-4-431-54246-9>
- SK FKS B Kel. Simp. Haru 2025-2030. (n.d.). *Surat Keputusan Forum Kelompok Siaga Bencana Kelurahan Simpang Haru periode 2025–2030*.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suparji, S., Nugroho, H. S. W., Sunarto, S., Sulikah, S., Setiyani, A., & Rusdianti, A. (2025). Development of a community-based disaster preparedness module: Enhancing resilience and response capabilities. *Health Dynamics*, 2(6), 239–248.
- Syahyanti, C., & Frinaldi, A. (2020). Efektivitas pelaksanaan peran Kelompok Siaga Bencana Kelurahan Olo dalam upaya mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami di kawasan Pantai Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(2), 44–53. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i2.123>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. (2007). <https://bnpb.go.id>